

Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur dalam Perspektif Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 Masehi)

Ellyda Retpitasi, Nailal Muna

Abstract

Gender problems are part of the central issues and themes that are not spared from discussion in society. Women who are in a leading position, then the policies of the reform era that give space to women give rise to women's leadership. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach trying to analyze women's leadership in East Java from the perspective of the decisions of the Muktamar, National Conference, and the Nahdlatul Ulama (NU) Council (1926-1999 AD). Gender equality in the phenomenon of women's leadership in East Java is known from a comparison of the number of female and male regional heads in East Java with a male percentage of 77.6% and 22.3% female. Women who are promoted to become regional heads in this case are not merely companions or objects to attract the people's vote but have similarities with male leaders with competence in leading and a qualified educational background and organizational experience. However, there are still indications of gender inequality in women's leadership in East Java, out of 17 female leaders, only 7 are identified as regents/mayors, while the number of women as deputy regents/mayors is 10. The position of women in leadership only as deputy regents/mayors shows gender inequality. Indications of gender inequality are known by women as objects of a political system built unilaterally by men. However, in the current reform era, the success of women's leadership can be seen, especially in the cadre of women within NU.

Keywords: Gender, Nahdlatul Ulama, Women's Leadership

PENDAHULUAN

Sebelum adanya era reformasi, budaya di Indonesia sangat menekankan budaya patriarki dengan memapankan laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak. Begitu sebaliknya dengan perempuan berada pada posisi subordinat, yakni tunduk pada laki-laki. Perempuan juga hanya layak berada di wilayah domestik, sama halnya dengan pandangan perempuan sebagai teman di belakang atau di balik wilayah public yang ditempati laki-laki.

Problematika budaya patriarki ini diketahui dari hasil penelitian Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 1995 yang menyatakan bahwa hampir 50% perempuan di pedesaan bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar. Dikutip dari organisasi buruh internasional pada tahun 2014 terdapat sekitar 47,1% perempuan bekerja di seluruh dunia, dibandingkan dengan pria yang mencapai 72,2%. Adapun Bank Dunia tahun 2012 menyatakan bahwa perempuan juga menanggung jumlah tenaga kerja tidak dibayar dengan proporsional dibandingkan laki-laki.¹ Dalam pemaparan Jobprofile.org pada tahun 2010 menyatakan bahwa semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki seorang perempuan, semakin besar perberbedaan yang ditunjukkan dalam upah yang dia dapatkan, perempuan dalam pekerjaan khusus professional hanya 72,7% dari apa yang diperoleh pria dalam posisi yang sama, dan perempuan dalam eksekutif tingkat atas, administrasi dan pekerjaan manajerial menghasilkan lebih sedikit lagi yaitu 72,3%, juga semakin tinggi karir perempuan, maka semakin sedikit anak yang mereka miliki.²

Sementara peran perempuan dalam wilayah publik /politik juga dibatasi, masing banyak anggapan bahwa perempuan tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat maka pandangan yang muncul sering kali menolak perempuan. Sebagaimana anggapan *sementara masih ada laki-laki maka laki-laki adalah yang paling tepat*.³ Kurangnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan diketahui bahwa struktur organisasi yang didominasi laki-laki dan biar gender, masyarakat

¹ Laura L. Bierema, "Women's Leadership: Troubling Notions of the 'Ideal' (Male) Leader," *Advances in Developing Human Resources* 18, no. 2 (Mei 2016): 119–36, <https://doi.org/10.1177/1523422316641398>.

² Hussin Hejase dkk., "Female Leadership: An Exploratory Research from Lebanon," t.t., 26.

³ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 6.

mempersiapkan bahwa kepemimpinan sesuai dengan laki-laki, sedangkan perempuan tidak cocok untuk peran kepemimpinan.⁴

Dalam bidang politik banyaknya praktek-praktek politik yang mendiskriminasi perempuan di setiap instansi formal sangat marginal, bahkan pada masa orde baru terdapat ketidakterwakilan perempuan dalam pusat-pusat “kekuasaan”, maka pengambil keputusan seringkali mengabaikan isu yang menjadi perhatian kaum perempuan dalam bidang politik maupun sosial.

Adapun era demokratisasi dan modernisasi saat ini, memunculkan kepemimpinan perempuan di Jawa Timur diawali dengan tenarnya sosok walikota Surabaya Tri Rismaharini, sosok perempuan ini terkenal dengan sosok pemimpin yang tegas dan kuat. Risma dikenal sebagai walikota yang berdampak pada perubahan Surabaya menjadi lebih tertata dan menjadi perempuan yang masuk dalam majalah forbes sebagai kategori 10 perempuan inspiratif di dunia.⁵ Hal ini menilik kepemimpinan perempuan di luar negeri seperti di Denmark yang mana jumlah perempuan yang menduduki kursi parlemen pada tahun 2013 sejumlah 49 persen, juga disertai Swedia yang berjumlah 42 persen.⁶

Setelah Risma, kepemimpinan perempuan muncul setelah pasca terpilihnya gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indar Parawansa yang kerap dipanggil Khofifah. Khofifah merupakan aktivis perempuan dari organisasi masyarakat (ORMAS) Nahdlatul Ulama (NU), sebelum terjun menjadi gubernur, Khofifah memiliki pengalaman menjadi anggota dewan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan.⁷ Kehadiran Khofifah sebagai Gubernur pertama perempuan di Jawa

⁴ Krystal Brue dan Shawn Brue, “Experiences and Outcomes of a Women’s Leadership Development Program: A Phenomenological Investigation,” *Journal of Leadership Education* 15, no. 3 (1 Juli 2016): 75–97, <https://doi.org/10.12806/V15/I3/R2>.

⁵ <https://surabaya.liputan6.com/read/4080568/5-srikandi-pemimpin-jawa-timur-cerdas-dan-berprestasi>

⁶ “Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan,” *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* 19, no. 4 (2014): iii.

⁷ <https://www.viva.co.id/siapa/read/224-dra-khofifah-indar-parawansa>

Timur memberikan dampak pada munculnya nama-nama perempuan dalam pemilihan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Islam pada dasarnya merupakan agama yang menekankan spirit keadilan dan keseimbangan (*tawazun*) dalam berbagai aspek kehidupan. Relasi gender (perbedaan laki-laki dan perempuan yang non kodrati) dalam masyarakat yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang Menekankan pada keadilan. Negara Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah seharusnya menggencarkan kesetaraan gender dalam ranah publik, seperti melibatkan perempuan dalam kepemimpinan. Begitupun Buya Hamka seorang tokoh intelektual Indonesia menganalisis pemimpin perempuan yang sukses dalam sejarah diantara Mesir, Aceh dan Makasar, dimana kesuksesan pemimpin perempuan di *support* dari tokoh sekitar yang bekerjasama.⁸

Berangkat dari fenomena munculnya kader-kader perempuan sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah di Jawa Timur menarik peneliti untuk menelaah kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur dalam Perspektif Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 Masehi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, Fenomenologi sebagai metodologi dalam penelitian kualitatif melalui proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman dengan mengakses pengalaman hidup individu. Proses fenomenologi meliputi identifikasi fenomena yang menarik, mengesampingkan pengalaman sebelumnya, mengumpulkan data, menyaring data menjadi analisis penelitian yang menarik. Fenomenologi digunakan sebagai analisis untuk mempelajari topik-topik yang menarik dan eksistensi saat ini, sebagaimana yang dipilih oleh peneliti menggunakan fenomena

⁸ Nasirudin Al Ahsani, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SA'ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬĪ: TELAHAH HADIS MISOGINIS," no. 1 (2020): 64.

munculnya pemimpin perempuan dalam hasil pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di wilayah Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan

Abdul Wahab Berpendapat bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam persyaratan status merdeka. Maka barangsiapa yang menolak keputusan perempuan, maka ia mempersamakannya dengan keputusan yang terkait dengan pimpinan tertinggi (kepala negara) dan menganalogikan perempuan itu dengan hamba sahaya karena kurangnya kehormatan pada perempuan. Bagi ulama yang memperbolehkan keputusan yang terkait dengan pimpinan tertinggi (kepala negara) dan menganalogikan perempuan itu dengan hamba sahaya karena kurangnya kehormatan pada perempuan. Bagi ulama yang memperbolehkan keputusan hukum oleh perempuan dalam masalah harta, maka berarti menyamakannya dengan kebolehan kesaksian perempuan dalam masalah harta. Dan pada dasarnya, semua yang memungkinkan penyelesaian masalah di kalangan masyarakat maka hukumnya boleh kecuali memang dikhususkan oleh masyarakat seperti pimpinan tertinggi.⁹

Pandangan tentang perempuan yang tidak layak menduduki *al-imamah al-'uzhma* (kepemimpinan puncak: presiden misalnya) sebenarnya tidak sesuai dengan perkembangan di era modernisasi saat ini. Dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah “pribadi” (*azza'mah al syakhsiyyah*), akan tetapi sudah menjadi bagian yang terlembaga (*nizham*). Oleh karena itu, kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas atau keperempuanan yang bersandar pada nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, keseimbangan, dan kedamaian (*non-violence*).

Adapun kepemimpinan secara fenomenanya saat ini lebih memiliki karakteristik yang lunak dan kolaboratif. Dalam Islam, setiap insan manusia merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri atau apa yang dipimpinya, hingga pada

⁹Ibid., 39

hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tentu pernyataan ini terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibu Umar r.a:

“Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang merupakan pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/ pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya”

Dari Hadits ini dapat ditelaah bahwa dasarnya manusia baik itu laki-laki maupun perempuan ialah seorang pemimpin, dan pokok dari suatu kepemimpinan dalam Islam merupakan tanggung jawab, dan tanggung jawab terkecil yang dipikul seseorang dalam hidupnya sekurang-kurangnya ialah dirinya sendiri. namun, tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya makna dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya lalu tidak menyisakan dakwah (*atsar*) bagi yang dipimpin. Akan tetapi lebih pada tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi apa yang dipimpinnya itu dalam dimaksudkan kebijakan dan tindakan pemimpin menentukan kesejahteraan apa yang dipimpinnya (*tasharruf al-imam ala al ra'iyah manuthun bi al maslahah*). Kepemimpinan perempuan dalam Islam di Indonesia dipelopori sejak perjuangan tokoh perempuan Raden Ayu Kartini, hingga membuka celan terciptanya keselarasan kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan, Pendidikan maupun kehidupan.¹⁰ Kepemimpinan Perempuan dalam fenomenanya saat ini telah terbukti lebih transformasional, partisipatif, dan inklusif daripada gaya kepemimpinan laki-laki. Menurut Hasil Prakarsa Pew Research 2008 yang mempelajari apakah laki-laki atau perempuan yang menjadi lebih baik, partisipan menilai perempuan dibandingkan pria dengan perbandingan lima

¹⁰ Isyatul Mardiyati, “Perempuan dan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam,” *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.160>.

banding satu dalam delapan karakteristik kepemimpinan teratas, termasuk kejujuran dan kecerdasan.¹¹ Perempuan dan laki-laki memiliki orientasi nilai yang berbeda, sehingga memerlukan penekatan yang berbeda dalam pengembangan kepemimpinan. Seperti konsepsi kesuksesan karir, perempuan cenderung mendefinisikan kesuksesan karir sebagai minat pada peran yang secara intrinsik memberi penghargaan, pencapaian pribadi, pengembangan diri, dan keseimbangan kehidupan kerja, sedangkan laki-laki cenderung melihat kesuksesan sebagai gaji tinggi, naik tangga perusahaan, dan mencapai kesuksesan.¹²

Kesetaraan Perempuan Perspektif Keputusan Muktamar. Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-1999M)

Islam memberi hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Dikutip dari keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-1999), Kesetaraan perempuan dapat diketahui dari pernyataan yang ada di QS Al Mukmin ayat 40, QS Al Imraan ayat 195, QS al-Nahl ayat 97, dan QS Al Ahzab ayat 35, Ayat-ayat ini merupakan sebuah realita pengakuan islam terhadap hak-hak wanita secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah Swt. Persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang wanita tersebut telah mengalami distorsi.

Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditemukan bahwa laki-laki (karena kondisi, sosial, dan budaya) memiliki kelebihan atas wanita. Pada gilirannya telah menafikan atau mengurangi prinsip-prinsip mulai tentang wanita yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang kemudian tidak diperhatikan. Oleh karena itu, maka di tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai

¹¹ Dr Diane J Chandler, "What Women Bring to the Exercise of Leadership" 3 (2011): 12.

¹² Margaret M. Hopkins dkk., "Women's Leadership Development Strategic Practices for Women and Organizations.," *Consulting Psychology Journal: Practice and Research* 60, no. 4 (2008): 348–65, <https://doi.org/10.1037/a0014093>.

belahan dunia yang pada prinsipnya menuntut Kembali hak-hak sebenarnya dari wanita, maka umat islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan wanita karena distorsi budaya, berdasarkan prinsip-prinsip kemuliaan atas wanita.

Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan kodrati/fitri. Sementara di luar itu ada peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing (laki-laki dan perempuan), harus memikul tanggung jawab Bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain.

Kajian dalam QS. At-Taubah ayat 71 menjelaskan peran domestic wanita hal itu merupakan kesejatian kodrat wanita seperti sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi-fungsi dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Sementara, QS. As Syura ayat 49 menjelaskan peran public wanita sebagai anggota masyarakat, wanita sebagai warga negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan dan melindungi. Dalam konteks peran-peran public menurut prinsip-prinsip islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik.¹³ Perempuan dipersiapkan dengan baik untuk mengambil peran kepemimpinan dengan melalui Pendidikan dan kemauan, akan tetapi tidak sesuai dengan citra organisasi sebagai pekerja ideal. Perempuan sering menemukan adanya ikatan ganda begitu mereka maju ke peran perempuan, mereka harus berhati-hati untuk tidak tampil terlalu maskulin atau terlalu feminine, hal ini berbeda dengan pekerja ideal seperti laki-laki yang menunjukkan perilaku maskulin dan komitmen teguh pada organisasi.¹⁴

¹³ Djamaluddin Miri, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)* (Surabaya: Diantama, 2005), 624–27.

¹⁴ Bierema, "Women's Leadership."

Analisis Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur

Terdapat lima prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam dunia politik yang demokratis diantaranya: Persamaan (Musawah atau *equality*) Keadilan (*'adalah* atau *justice*), Kebebasan (*hurriyah* atau *freedom*), dan Berkemampuan (*al-qudrah*). Kepemimpinan tidak dapat dibatasi oleh kekuatan fisik dan sifat-sifat maskulin yang ada pada diri seseorang berdasarkan jenis kelamin.

Kepemimpinan perempuan dalam Islam dijelaskan dalam konsep kemitraan yang sejajar serta saling mengisi satu dengan yang lain agar dapat mengenal siapa dirinya dan orang lain. Hal ini tersirat dalam QS Al Hujarat ayat 13 yang berarti bahwa setiap manusia diciptakan baik laki-laki maupun perempuan untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal.¹⁵ Adanya kesetaraan gender dalam fenomena kepemimpinan perempuan di Jawa Timur diketahui dari perbandingan jumlah kepala daerah perempuan dan laki-laki di Jawa Timur dengan presentase laki-laki 77,6% dan perempuan 22,3% yang cukup hampir sama dengan kuota pemimpin dalam ranah eksekutif pemerintahan yakni DPR/DPRD yang berkuota 30%. Perempuan yang diusung menjadi kepala daerah dalam hal ini bukan semata sebagai pendamping atau objek untuk menarik minat masyarakat memilih akan tetapi juga diikuti dengan kemampuan dalam memimpin dan latar belakang Pendidikan serta pengalaman berorganisasi yang mumpuni.

Perbandingan Jumlah Kepala Daerah Perempuan dan Laki-laki di Jawa Timur

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	59	77,63157895
Perempuan	17	22,36842105
Total	76	100

¹⁵ Mardiyati, "Perempuan dan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam."



Kepala Daerah di Wilayah Jawa Timur diantaranya Hj. Ipuk Fietandani S.Pd (Bupati Banyuwangi), Rini Syarifah (Bupati Blitar), Anna Mu'awanah (Bupati Bojonegoro), Aminatun Habibah (Wakil Bupati Gresik), Mundjidah Wahab (Bupati Jombang), Indah Amperawati (Wakil Bupati Lumajang), Ikfina Fahmawati (Bupati Mojokerto), Lisdyarita (Wakil Bupati Ponorogo), Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo), Dewanti rumpoko (Walikota Batu), Ika Puspitasari (Walikota Mojokerto), Dewi Maria Ulfa (Wakil Bupati Kediri), Hj. Nanik Endang Rusminarti (Wakil Bupati Magetan), Hj. Koirani (Wakil Bupati Situbondo), Dewi Khalifah (Wakil Bupati Sumenep), dan Inda Raya Ayu Miko Saputri (Wakil Walikota Madiun). Sebagian besar kepala daerah perempuan berafiliasi dengan partai PDI-P, PKB, PPP, dan Gerindra.

Kepemimpinan perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan serta dengan hak yang sama juga dimiliki oleh laki-laki. Adapun penafsiran terkait bias gender yang ditafsirkan dalam surat Al-Nisa' ayat 34 terdapat kata "*qawwamun*" serta dalam hadis "*Lan Yufliha Qaumun Wallaw amruhum imra'atan*". Kedua ayat dan hadis itu ditafsirkan menurut referensi Islam yang menegaskan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. Dari sudut penafsiran terdapat pemahaman bahwa mengenai dua wilayah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di wilayah publik atau wilayah

muamalah, sementara perempuan berada di wilayah domestik.¹⁶ Tafsir ini dapat dijadikan acuan untuk konteks hubungan domestic rumah tangga, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi publik.

Dengan kata lain, bahwa kedudukan wanita dalam proses system negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai keniscayaan.

Kepemimpinan perempuan di Jawa Timur jika diamati sesuai dengan kecenderungan gaya kepemimpinan cenderung menggunakan ketrampilan relasional untuk memengaruhi orang lain, mendorong partisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi, serta menggunakan ketrampilan interpersonal dalam memotivasi pengikut daripada menerapkan kekuasaan atau otoritas posisional.

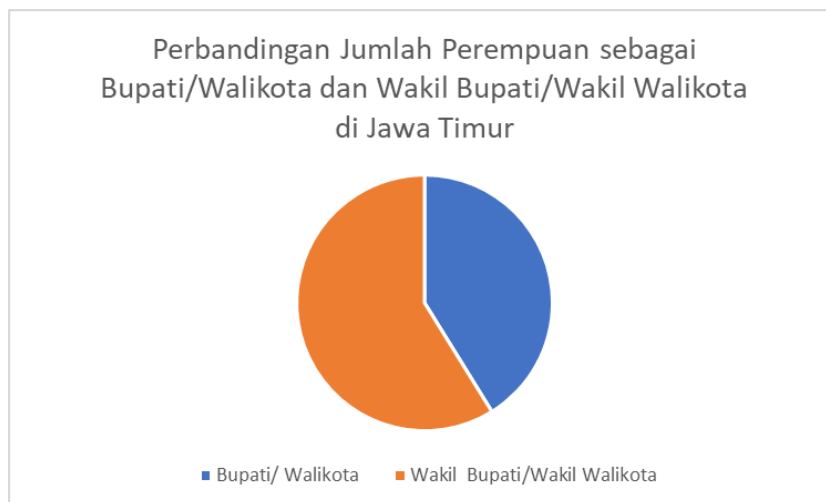
Partisipasi perempuan dalam sector non kodrati menjadi wujud tanggung jawab NU sebagai organisasi yang ikut serta mendorong dan mengukung perempuan dalam ranah kepemimpinan daerah turut serta dalam memprakarsai transformasi kultur, kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional dalam era globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi dalam memberdayakan Wanita Indonesia pada proporsi sebenarnya.

Indikasi Ketidaksetaraan Gender dalam Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur

Munculnya perempuan dalam ranah kepemimpinan kepala daerah di Jawa Timur yang dapat diasumsikan sebagai wujud dari kesetaraan gender, akan tetapi jika dianalisa secara rinci tetap ditemukan indikasi ketidaksetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan di Jawa Timur, dari 17 pemimpin perempuan dirinci hanya 7 orang yang menduduki kursi sebagai bupati/walikota sedangkan jumlah

¹⁶ Miri, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, 649.

perempuan yang menduduki kursi sebagai wakil bupati/walikota berjumlah 10 orang. Kedudukan perempuan yang mana dalam kepemimpinan hanya sebagai wakil bupati/walikota mengindikasikan ketidaksetaraan gender. Indikasi ketidaksetaraan gender diketahui dari perempuan sebagai obyek dari system politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum laki-laki. Hal ini perempuan di pandang tidak layak mendidiki *al imamah al- 'uzhma* (kepemimpinan puncak).¹⁷



Keberhasilan Pengkaderan Perempuan di kalangan NU

Perempuan di kalangan NU era Reformasi saat ini dipersiapkan dengan baik untuk mengambil peran kepemimpinan. Adapun kriteria perempuan yang mengambil peran sebagai pemimpin memiliki pendidikan dan kemauan. Perempuan sering menemukan diri mereka dalam ikatan ganda begitu mereka maju ke peran kepemimpinan. Mereka harus berhati-hati untuk tidak tampil terlalu maskulin atau terlalu feminin sementara juga mempersonifikasikan pekerja "ideal" (laki-laki) dengan menunjukkan perilaku maskulin dan komitmen teguh pada organisasi. Memegang garis ini menantang dan sering bertentangan dengan identitas perempuan dan mengalami konflik antara kehidupan dan pekerjaan.

Perempuan adalah pemangku kepentingan yang jelas, tetapi, pada akhirnya, semua orang dalam organisasi adalah pemangku kepentingan yang mendapat

¹⁷ Miri, *Solusi Problematika*, 652.

manfaat dari pemimpin perempuan dan kepemimpinan yang lebih baik, hal ini diketahui dari bermunculnya kader-kader NU yang hadir sebagai pemimpin daerah, mulai dari perwakilan organisasi Fatayat NU dan Muslimat NU, dari wakil bupati, Bupati, Walikota, Wakil Walikota, hingga Gubernur Perempuan di Jawa Timur merupakan kader dari NU. Pemimpin profesional juga mendapat manfaat dengan memahami lebih baik bagaimana mengembangkan pemimpin perempuan, khususnya, dan kepemimpinan, secara umum. Secara global, para pemimpin terpilih, organisasi non-pemerintah, dan negara dapat mengembangkan kebijakan yang berpotensi mempengaruhi dan menciptakan perubahan pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi bagi perempuan.

PENUTUP

Era reformasi, dan demokratisasi di Indonesia memberikan peluang untuk berperan dalam ranah publik. Perempuan yang dipersepsikan hanya dapat berperan dalam ranah domestik pun kini mulai terkikis. Dalam Munas, Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 Masehi dicetuskan beberapa hal terkait kesetaraan gender dan persamaan perempuan dalam ranah kepemimpinan di masyarakat mulai dari tingkat desa hingga peran dalam ranah eksekutif negara. Sebagaimana munculnya pemimpin perempuan di Jawa Timur pada hasil pemilihan kepala daerah baik bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota. Kesetaraan gender dalam fenomena kepemimpinan perempuan di Jawa Timur diketahui dari perbandingan jumlah kepala daerah perempuan dan laki-laki di Jawa Timur dengan presentase laki-laki 77,6% dan perempuan 22,3% yang cukup hampir sama dengan kuota pemimpin dalam ranah eksekutif pemerintahan yakni DPR/DPRD yang berkuota 30%. Perempuan yang diusung menjadi kepala daerah dalam hal ini bukan semata sebagai pendamping atau objek untuk menarik minat masyarakat memilih akan tetapi juga diikuti dengan kemampuan dalam memimpin dan latar belakang Pendidikan serta pengalaman berorganisasi yang mumpuni. Akan tetapi tetap saja ditemukan indikasi ketidaksetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan di Jawa Timur, dari 17 pemimpin perempuan dirinci hanya 7 orang yang menduduki kursi sebagai bupati/walikota sedangkan jumlah perempuan yang menduduki kursi

sebagai wakil bupati/walikota berjumlah 10 orang. Kedudukan perempuan yang mana dalam kepemimpinan hanya sebagai wakil bupati/walikota mengindikasikan ketidaksetaraan gender. Indikasi ketidaksetaraan gender diketahui dari perempuan sebagai obyek dari system politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Nasirudin Al. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SA'ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬĪ: TELAHAH HADIS MISOGINIS," no. 1 (2020): 18.
- Bierema, Laura L. "Women's Leadership: Troubling Notions of the 'Ideal' (Male) Leader." *Advances in Developing Human Resources* 18, no. 2 (Mei 2016): 119–36. <https://doi.org/10.1177/1523422316641398>.
- Brue, Krystal, dan Shawn Brue. "Experiences and Outcomes of a Women's Leadership Development Program: A Phenomenological Investigation." *Journal of Leadership Education* 15, no. 3 (1 Juli 2016): 75–97. <https://doi.org/10.12806/V15/I3/R2>.
- Chandler, Dr Diane J. "What Women Bring to the Exercise of Leadership" 3 (2011): 12.
- Hejase, Hussin, Ziad Haddad, Bassam Hamdar, Rasha Massoud, dan George Farha. "Female Leadership: An Exploratory Research from Lebanon," t.t., 26.
- Hopkins, Margaret M., Deborah A. O'Neil, Angela Passarelli, dan Diana Bilimoria. "Women's Leadership Development Strategic Practices for Women and Organizations." *Consulting Psychology Journal: Practice and Research* 60, no. 4 (2008): 348–65. <https://doi.org/10.1037/a0014093>.
- Mardiyati, Isyatul. "Perempuan dan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam." *Raheema* 1, no. 1 (1 Juni 2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.160>.
- Miri, Djamaluddin. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*. Surabaya: Diantama, 2005.
- Muhammad, K.H. Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.
- "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Keadilan* 19, no. 4 (2014).